

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Carunia, M. Firdausy. 2018. *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marrus, *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. United States of America : SAGE Publication, Inc
- Moleong. L. J. 2010. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Pearce, A J and Robinson, B. Richard. 2011. *Manajemen Strategi – Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saladin. (2003). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Bandung: Linda Karya.
- Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi no Profit*. Grasindo Gramedia Widia Sarana Indonesia : Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sofjan Assauri, 2016. *Strategic Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, M. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman, 2016. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.

Jurnal dan Skripsi

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1-19.
- Al Kautsar, M. Z., & Hidayat, A. (2022). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(3).
- Amalia, D. (2021). Pengaruh likuiditas, leverage dan intensitas aset terhadap

- agresivitas pajak. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 232-240.
- Effendy, S., & Harahap, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Snistek* 3, 4(1), 138–143.
- Makmur, S. (2017). *Program studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar 2017*. 1–129.
- Nurtanzila, L. (2016). Kemandirian Fiskal Daerah Otonomi: Kesiapan Daerah dalam Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan. *Natapraja*, 4(1).
- Pratiwi, L. N. (2010). Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Priyono, N. (2010). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 2, 13–26.
- Syahrin, A., Ma'arif, S., & Mulyana, N. (2020). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lampung Utara. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1).
- Sumbu, T. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 567–588. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art4>.
- Wulan, R. S. (2015). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan. Kota Surabaya. *Publika*, 3(4).
- Yusuf, M. H. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).

Sumber lain

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pengampunan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang tentang Pajak Daerah.
- Perbup Banyumas Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK0.3/2022 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Website

<https://peraturan.bpk.go.id/>

<https://keuda.kemendagri.go.id//sispensi/>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/>

<https://elingpbb2.banyumaskab.go.id/>

<http://bapenda.banyumaskab.go.id/>

